

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dalam tahap pengembangannya, berupaya membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Melalui industri ini, pendapatan devisa diperkirakan akan meningkat. Potensi Kabupaten Berau dibentuk oleh kondisi geografis, sejarah dan budaya Kabupaten Berau. Sesuai dengan UU No.10 Tahun 2009 Pasal 6 mengenai Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi objek laut/laut. Potensi wisata sejarah meliputi atraksi warisan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Berau dengan segala budayanya. Keanekaragaman terumbu karang di Berau adalah yang tertinggi kedua setelah Raja Ampat, dan dunia ketiga setelah Salomon, dan spesies kerang keras (terumbu karang dan terumbu karang memiliki luas 66.122 ha).

Pariwisata dinilai cukup berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sehingga prioritasnya cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara. Pariwisata merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional, misalnya: meningkatkan industri baru yang terkait dengan jasa pariwisata seperti transportasi dan akomodasi (hotel, pondok, dll), mendukung pendapatan negara dengan devisa sehingga mengurangi defisit neraca pembayaran dan mempromosikan ekonomi nasional (Yakup, 2022). Pariwisata juga mendapatkan dampak positif pada tenaga kerja negara, karena memperluas lapangan kerja baru.

Namun, selama koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini masih belum sepenuhnya terintegrasi, terlihat dari tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan. Kota/Kabupaten melakukan promosi langsung ke luar negeri tanpa koordinasi pemerintah pusat atau provinsi, sedangkan pemerintah pusat/provinsi juga melakukan hal yang sama, sedangkan sumber anggaran yang sama berasal dari pemerintah (APBN/APBD). Sesuai dengan UU No.10 Tahun 2009 Pasal 8, dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, disebutkan bahwa Kepulauan Derawan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan masuk dalam Segitiga Karang Karang Dunia. Dengan potensi Kabupaten Berau, pemerintah Kabupaten Berau sebagai transformasi ekonomi di sektor pariwisata akan melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kalimantan Timur dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kabupaten Berau.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau memiliki visi dan misi dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau untuk menjadikan pariwisata Kalimantan Timur sebagai pariwisata berbasis ekowisata dan kearifan lokal, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pariwisata. Arah ekowisata, yang prinsipnya sama dengan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Ekowisata merupakan target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2025 di bawah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mencatat kontribusi sektor pariwisata mencapai 9, 84 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2020. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Masrani menyatakan dengan memiliki 276 destinasi wisata baik di darat maupun di laut, PAD sektor pariwisata yang berasal dari pajak mencapai Rp 23, 01 miliar (Pendapatan Asli Daerah : Badan Pendapatan Daerah, n.d.).

Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata harus dikelola dengan baik dan profesional oleh pemerintah daerah. Untuk mempercepat

pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai investasi dan kebutuhan ekonomi lainnya serta peran pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan Negara. Peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 5 prospek pariwisata cenderung meningkat secara konsisten. Sehingga upaya pemerintah dalam mempromosikan sektor pariwisata sangat tepat sebagai alternatif pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan pariwisata, pemerintah pusat mengimbau untuk melakukan pengembangan secara maksimal terhadap setiap potensi pariwisata di setiap daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengembangan sektor pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan penelitian di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pembangunan strategi sektor wisata di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata pada objek di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Magang mempunyai manfaat yang besar bagi mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Instansi atau Perusahaan, adapun manfaat tersebut adalah

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

- 2) Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa tentang dunia kerja dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
- 3) Mengetahui dokumen-dokumen perencanaan yang disusun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Terjalannya kerjasama antara universitas dengan instansi atau perusahaan.
- 2) Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktik kerja/magang.

c. Bagi Instansi atau Perusahaan

- 1) Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
- 2) Dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

1.4 Definisi Konseptual

1.4.1 Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Dalam perencanaan pengembangan pariwisata, perencana harus mempertimbangkan tren dan perkembangan daya tarik, transportasi, informasi, dan promosi (Kusuma Negara, 2021). Daya tarik merupakan bagian penting dalam penyediaan pariwisata.

Daya tarik wisata merupakan elemen yang menarik untuk menarik wisatawan berkunjung ke suatu lokasi; kemudian, unsur/fasilitas penunjang selanjutnya dapat mulai dipertimbangkan untuk perencanaan. Dengan cara yang lebih klasik, model dalam perencanaan pariwisata telah dirangkum oleh (Getz, 2018). Menurut Getz, ada beberapa model atau pendekatan dalam perencanaan pariwisata, yaitu seluruh sistem, spatial/temporal, motivation, impact, area development, project development, management/marketing, dan integrated models.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan pariwisata tidak lepas dari pertimbangan pembangunan/perencanaan daerah. "integrasi" antara

pariwisata dan pembangunan daerah terjadi selama beberapa dekade, ketika pariwisata telah dilihat sebagai alat untuk pembangunan regional di daerah pinggiran. Sebagai bagian dari alat pengembangan regional, pariwisata merupakan bisnis besar untuk memicu pembangunan (Telfer and Sharpley, 2015); dalam hal pembangunan ekonomi, mobilitas orang, jaringan bisnis, dan masalah pemerintah. Selain itu, dengan adanya "dimensi spasial" dalam perencanaan pengembangan pariwisata seperti untuk kawasan pariwisata, kawasan pariwisata, pusat pariwisata, bangunan, dll. Membuat rencana pariwisata yang membutuhkan sinkronisasi dengan rencana lain, terutama dengan rencana pembangunan daerah.

Beberapa wawasan yang diungkapkan di atas membuat kita memahami bahwa kehadiran pariwisata dapat berkontribusi sebagai "mesin pertumbuhan" di perbatasan untuk mempromosikan pembangunan. Interaksi antara pariwisata dan perbatasan dapat mendorong "interaksi positif" dengan mendorong orang untuk bepergian, kemudahan jalur barang, jasa, dan orang, dengan mempromosikan kerja sama, dan akhirnya dengan berkontribusi pada pembangunan lokal / wilayah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kegiatan perencanaan pembangunan dan sinkronisasi rencana. Perencanaan adalah kegiatan untuk menghasilkan rencana dan kode, serta untuk menegakkannya. Selain itu, akan selalu digelorkan oleh isu-isu dalam periode terkait.

1.4.2 Pariwisata

Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan 22 pariwisata dan multidimensi dan multidisiplinnya yang muncul sebagai perwujudan kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama pelancong, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan intelektual setiap wisatawan dengan waktu luang dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1.4.3 Wisata

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun dalam kelompok-kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau yang lain (Revida *et al.*, 2020). Secara etimologis, pariwisata (pariwisata) terdiri dari dua suku kata, yaitu "pari" dan "wisata". Kedua kata tersebut mengandung arti sebagai berikut: (a) Pari berarti berkali-kali, dalam lingkaran, lengkap (paripurna) dan (b) Wisata berarti perjalanan, perjalanan. (Revida *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa: Pariwisata adalah keseluruhan elemen terkait (wisatawan, destinasi wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan hasil dari perjalanan wisata ke tujuan wisata, selama perjalanan tersebut tidak permanen.

1.4.4 Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep utama pembangunan dan pariwisata memiliki dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang sangat besar di dunia modern oleh karena itu pengembangan sektor ini terkait dengan ketiga dimensi keberlanjutan yang disebutkan. Karena proses pembangunan ekonomi sosial dan teknologi global masih luas, analisis bentuk-bentuk baru dan spesifik, hadir dalam bisnis juga diperlukan dalam pariwisata untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satunya melibatkan cluster, mendapatkan signifikansi yang lebih besar – untuk menemukan dalam satu jaringan perusahaan geografis dan perusahaan yang bekerja sama erat dan yang berfokus pada hasil bisnis bersama dan yang melengkapi masing-masing other. Inovasi diharapkan dapat berkontribusi pada terobosan di tingkat internasional dan yang dapat menentukan operasi perusahaan di bawah bentuk organisasi efektif baru yang menggeneralisasi ide, memberikan beberapa keunggulan kompetitif dan membuka kemungkinan baru dalam pariwisata juga (Agyeiwaah, McKercher and Suntikul, 2017). Oleh karena itu, isu-isu pembangunan pariwisata berkelanjutan terkait erat dengan daya saing melalui peningkatan inovasi di semua bidang yang relevan dengan operasi bisnis. Selain itu, pariwisata adalah tempat tidur descri sebagai bisnis, membedakan dengan berbagai macam, integritas dan multi-perencanaan. Tepatnya, interkoneksi besar komponen struktural, membentuk bisnis pariwisata, memungkinkan anggapan bagi perusahaan,

menyediakan layanan pariwisata, untuk bekerja sama dalam imple- mentasi inovasi (Madhavan and Rastogi, 2013)

1.4.5 Peran Pariwisata dalam Sektor Ekonomi

Pariwisata telah diakui sebagai salah satu sektor ekonomi paling signifikan di negara-negara besar di dunia. Menurut World Travel and Tourism Council (2020) pada tahun 2018, sektor Travel & Tourism mengalami pertumbuhan 3,9%, melampaui ekonomi global (3,2%) untuk tahun kedelapan berturut-turut. Selama 5 tahun terakhir, satu dari lima pekerjaan diciptakan oleh sektor ini, menjadikan Perjalanan & Pariwisata sebagai mitra terbaik bagi pemerintah untuk menghasilkan lapangan kerja. Oleh karena itu, pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia, mendukung satu dari 10 pekerjaan (319 juta) di seluruh dunia, dan menghasilkan 10,4% dari PDB global. Meskipun pasar pariwisata tergantung pada kesehatan dan lingkungan alam; namun, secara bersamaan sering mempengaruhi mereka secara negatif. Oleh karena itu, isu-isu lingkungan pengembangan pariwisata memerlukan perhatian khusus dan ditangani oleh beberapa studi penting (Waligo, Clarke and Hawkins, 2013; Pjerotic, 2017).

Kualitas hidup merupakan salah satu target terpenting pembangunan berkelanjutan yang juga relevan dengan sektor pariwisata dalam hal memberikan pelayanan bagi wisatawan serta dengan mempertimbangkan kualitas hidup penyok resi di destinasi wisata (Jeon, Kang and Desmarais, 2014) Menggeneralisasi pernyataan yang diungkapkan, pra-sumptions dapat dibuat, untuk menemukan cara untuk memaksimalkan kualitas kehidupan di masa depan dan karenanya untuk menghindari krisis ekonomi baru di seluruh dunia (Morgan, Pritchard and Sedgley, 2015; Kakoudakis, McCabe and Story, 2017).

1.5 Definisi Operasional

Edward (1980) menyatakan bahwa terdapat empat variabel penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi. Menurut Edward, konteks kecenderungan dan perilaku berarti kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pengambil kebijakan untuk mengimplementasikannya secara serius sehingga objek kebijakan dapat terwujud (Edwards and Nagel, 1984). Jika suatu kebijakan ingin

diimplementasikan secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga memiliki niat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut indikator tersebut (Kania et al., 2019)

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk dan proses penyampaian informasi antar manusia.

b. Sumber daya

Suatu kebijakan akan lebih lengkap jika terdapat sumber daya yang dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dalam implementasinya.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dari pendekatan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sendiri wajib diperlukan dalam kebijakan yang kompleks untuk menuntut kontribusi banyak orang.

1.6.1 Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif, pada tahap awal peneliti mengeksplorasi, kemudian mengumpulkan data secara mendalam untuk menemukan hipotesis berupa hubungan antar gejala dengan memberikan gambaran dan analisis mendalam terkait perkembangan wisata di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah studi yang bermaksud untuk memahami fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan mendeskripsikannya dalam bentukkata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus, alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

(Yin, Roberth, 2009) jenis studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan mengapa penelitian itu dipilih, bagaimana

implementasi dan apa hasilnya. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengetahui kedalaman suatu fenomena yang terjadi di masa sekarang, dengan peneliti yang memiliki kontrol terbatas terhadap peristiwa yang akan diteliti. Ini sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini para peneliti ingin mengetahui pelaksanaan suatu program dan apa hasilnya, dengan partisipasi terbatas dari para peneliti untuk mengendalikan peristiwa tersebut.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ialah kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan beberapa aparatur yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawab atas implementasi kebijakan dalam pengawasan.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data primer. Sumber data utama ini direkam melalui catatan tertulis atau dengan perekaman kaset video atau audio dan dengan mengambil foto atau film. Selain itu, data primer yang dimaksud adalah data langsung dan langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk keperluan khusus. Sumber data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
- b. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
- c. Masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Berau

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada di luar kata dan tindakan, tetapi data sekunder tidak boleh diabaikan. Dari segi sumber data, materi

tambahan yang berasal dari sumber tertulis terdiri dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen personal dan dokumen resmi. Selain itu, data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang pertama kali dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang-orang di luar peneliti itu sendiri, meskipun data yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data asli. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, dokumentasi kegiatan pariwisata, jumlah pengunjung serta gambar tempat wisata.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang berlokasi di Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315. Kami memilih lokasi tersebut karena selain mencari pengalaman dengan magang, saya juga bermaksud memperoleh data tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, selama 2 bulan.

1.6.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Pengamatan

Pengamatan atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai "perhatian terfokus pada peristiwa, gejala, atau sesuatu". Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak lain yang terlibat langsung dalam pengembangan wisata Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tindakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mencatat, dan mengumpulkan dokumen berupa arsip dan catatan yang menjadi masukan dalam penyusunan penelitian yang dianggap penting dan relevansinya dengan permasalahan studi. Di sini para peneliti mengumpulkan data atau informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau .

1.6.6 Teknik Analisis Data dan Waktu Penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan cara berfikir induktif untuk menganalisa data dan mendapatkan kesimpulan. Metode berfikir induktif

mengambil data sebagai pijakan dalam menjelaskan fenomena sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. adapun 3 (tiga) teknik analisa data antara lain:

a) Reduksi

Reduksi data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b) Penyajian Data

Penyajian data Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian- penyajian tersebut.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam penganalisaan selama peneliti menulis. Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan ‘intersubjektif’ atau temuan pada salinan dan data yang lain (Sari *et al.*, 2022).